

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2011, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Ed. Revisi-11*, Rajawali Pres, Jakarta.
- H.S, Salim 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ira Koesomawati & Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Cetakan ke-1, Raih Aksa Sukses, Jakarta.
- Kansi, C S T & Christine S T Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kriekhoff, Valerine J.L, 2007, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sulihandari, Hastanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Jurnal/Artikel/Tesis :

Adjie, Habib, *Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris*, Makalah dalam Kuliah Umum Studi Magister Kenotariatan FH UGM, 19 Oktober 2009.

Aisah, Nur, “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuat Dihadapannya”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Barulianasary, Neny, “Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris Sebagai Penerima Protokol Akta Notaris yang Pensiun di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Merta, CG Kartika, “Pelaksanaan Perpindahan Kedudukan Jabatan Notaris Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode Tahun 2020-2023)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 990 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019.

Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015.

Perubahan Kode Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan.

Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Wawancara :

Wawancara dengan Dewi Panawiningsih, Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2021.

Wawancara dengan Notaris & PPAT Nurhadi Darussalam, S.H., Sleman, pada tanggal 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Notaris & PPAT Tri Agus Heyono, S.H., Sleman, pada tanggal 12 Mei 2022

Wawancara dengan Notaris & PPAT Agung Herning, S.H., M.Kn. selaku Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia hari Jumat tanggal 09 Juni 2023.

Wawancara dengan Notaris & PPAT Muchammad Agus Hanafi, S.H., Yogyakarta, pada 14 Juli 2023.

Wawancara dengan Notaris dan PPAT Sri Budi Wibowo, S.H., Kabupaten Sleman, pada tanggal 10 Juli 2023.

Internet :

Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, 2019, "Profil Pimpinan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI", dalam <https://kemenkumham.go.id/> diakses 21 Januari 2022.